



**PIDATO KETUA DPR-RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR-RI
PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN I
TAHUN SIDANG 2009 - 2010**

14 AGUSTUS 2009

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**



**PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA
PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN I
TAHUN SIDANG 2009– 2010**

JUM'AT, 14 AGUSTUS 2009

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2009**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA
PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN I
TAHUN SIDANG 2009 – 2010**

JUM'AT, 14 AGUSTUS 2009



Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Sejahtera bagi kita semua.

Yang kami hormati,

- **Saudara Presiden Republik Indonesia,**
- **Saudara Wakil Presiden Republik Indonesia,**
- **Pimpinan dan Anggota Lembaga Negara,**
- **Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu,**
- **Yang Mulia Para Duta Besar/Kepala Perwakilan Negara Sahabat**
- **Para Undangan dan Hadirin yang kami mullakan,**

Mengawali Sidang Paripurna Dewan hari ini, perkenalkanlah saya mengajak kita semua untuk mempersembahkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan karunia dan rahmat-Nya, kita semua dapat bertemu kembali dalam kondisi sehat, untuk mengikuti Rapat Paripurna DPR Ri pada pagi hari ini. Agenda Sidang Paripurna hari ini adalah Pidato Ketua DPR Ri dalam rangka Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2009-

2010 dan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangkaian HUT Proklamasi Kemerdekaan RI yang ke-64.

Dalam Rapat Paripurna Dewan pagi ini, tercatat....Anggota Dewan telah menandatangani daftar hadir, terdiri dari semua unsur Fraksi yang ada di lembaga ini. Oleh karena itu, dengan mengucap *Bismillahirrahmanirrahim*, izinkanlah kami membuka Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia—Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2009-2010. Dan sesuai Pasal 95 Ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI, Rapat Paripurna ini kami nyatakan terbuka untuk umum.

Sebelum kami menyampaikan Pidato ini, sesuai Peraturan Tata Tertib DPR, perlu kami sampaikan bahwa DPR baru saja menerima dua surat dari Presiden Nomor R-42/Pres/07/2009 dan R-45/Pres/08/2009 tentang Permohonan Pertimbangan bagi Duta Besar LBBP negara-negara sahabat untuk RI. Surat ini akan segera diproses sesuai dengan mekanisme Dewan.

Dalam forum yang terhormat ini pun, perlu kami beritahukan bahwa dua rekan kita Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri dan Perdagangan (Indag) Saudara Drs. A. Muhalmin Iskandar, M.Si., dan Pimpinan BKSAP Saudara Drs. Tosari Widjaja berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41/TK/2009 tertanggal 11 Agustus 2009 akan menerima penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputra Adipradana dari Pemerintah Republik Indonesia. Insya Allah, penyematan akan dilakukan pada hari Sabtu, 15 Agustus 2009, besok pagi di Istana Negara Jakarta. Penganugerahan Bintang Mahaputra Adipradana ini merupakan manifestasi dari pengabdian beliau bagi bangsa dan negara. Atas nama Dewan, saya menyampaikan ucapan "Selamat".

Sidang Dewan yang terhormat,

Mengawali Pidato Pembukaan Masa Persidangan I ini, izinkanlah saya atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas prestasi yang ditunjukkan oleh aparat Kepolisian RI khususnya Detasemen Khusus 88 Anti-Terror atas keberhasilan melakukan serentetan perburuan, penyergapan, penangkapan, dan menembak mati para teroris kaki tangan Noordin M. Top awal Agustus yang lalu, di dua tempat berbeda, Jati Asih Bekasi dan Temanggung. Orang-orang yang mengambil peran dalam aksi terror, khususnya di JW Marriott dan Ritz Carlton, berhasil dilumpuhkan. Rencana peledakan bom yang berkekuatan sangat besar, yang akan diledakkan pada sasaran baru, berhasil digagalkan.

Menyikapi kebiadaban aksi teroris yang sudah berjalan bertahun-tahun, semua lapisan masyarakat harus dapat melawannya, kita tidak boleh dikalahkan oleh aksi-aksi terror. Kita harus berperang, bersatu padu, melipatgandakan kewaspadaan menghadapi aksi-aksi terror yang telah berkembang dengan intensitas tinggi. Perang melawan aksi terror masih akan terus berlanjut, lebih-lebih teroris yang paling dicari, Noordin M. Top, masih belum tertangkap. Perang melawan teroris tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat.

Dalam kaitan dengan teroris ini, Sidang Executive Committee Parlemen Se-Asia (*Asian Inter Parliamentary Assembly*), yang digelar beberapa hari yang lalu di Jakarta, juga menjadikan masalah teroris ini sebagai bahasan utama. Terorisme memiliki karakter yang tidak mengenal batas-batas negara, dan menjadi permasalahan bersama negara-negara lain. Untuk itu, diperlukan kerja sama dengan negara-negara lain untuk memerangnya.

Masa Persidangan I Tahun Sidang 2009-2010 adalah masa persidangan terakhir bagi DPR RI hasil Pemilu 2004. Berbagai persoalan kelembagaan, persoalan kemasyarakatan, serta persoalan-persoalan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diupayakan untuk diselesaikan dalam koridor tugas-tugas konstitusional Dewan, dalam bentuk pelaksanaan fungsi perundang-undangan, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. DPR RI Periode 2004—2009 adalah DPR RI transisi yang bekerja atas dasar UUD 1945 yang mengalami empat kali perubahan dan pasca reformasi yang digulirkan pada tahun 1998. Reformasi politik yang dikawal DPR selama lima tahun ini dan untuk masa-masa yang akan datang haruslah reformasi politik yang tidak terpisah dari reformasi ekonomi, sosial, dan hukum. Semua harus berjalan seimbang menuju terbangunnya sebuah *peradaban demokrasi* yang benar-benar dikehendaki rakyat sesuai Amanat Pembukaan UUD 1945.

Semuanya telah berjalan baik dan Dewan telah berusaha mengawalinya. Namun demikian kita tidak menafikan masih banyak tugas-tugas dan 'pekerjaan rumah' yang belum terselesaikan bahkan dalam implementasinya, masyarakat menyorotinya dengan nada sumbang dan negatif. Itu semua sangat kita sadari.

Memang, salah satu tantangan terbesar adalah *bagaimana membangun suatu peradaban, tradisi, dan kultur berparlemen yang baik, yang dikehendaki oleh rakyat*. Bagaimana parlemen dalam hal ini DPR RI mampu berbicara dan mendialogkan berbagai masalah publik untuk kemudian dirumuskan menjadi kebijakan dalam bentuk undang-undang dan berbagai kebijakan negara lainnya. Bagaimana parlemen mampu mengawasi kebijakan pemerintah, mengawasi pelaksanaan APBN dan mengawasi pelaksanaan UU dalam format *checks and balances*. Untuk itu, DPR berusaha melakukan penguatan kesepahaman bersama, menghargai perbedaan dengan menyediakan alternatif pemecahan, mentradisikan dialog internal

maupun eksternal dalam forum-forum konsultasi. Walaupun yang terakhir ini seringkali menjadi berlarut-larut untuk dapat memperoleh kesepakatan bersama.

Dewan juga berusaha bagaimana konflik-konflik yang muncul di masyarakat, diredam dan dikendalikan. Semuanya itu adalah langkah-langkah yang dibangun dan ditradisikan untuk memperkuat fungsi dan kedudukan DPR RI dalam lima tahun berjalan ini. Memang banyak kelemahan, tetapi kita berusaha untuk mengatasinya, karena besarnya harapan publik kepada DPR pada saat DPR mengawali tugasnya pada bulan Oktober 2004, sebagaimana yang sering saya katakan sebagai *the revolution of rising expectation* (revolusi harapan publik).

Oleh karena itu, Dewan dalam perjalanannya berusaha untuk memperkuat piranti lunak (*software*) dan dan piranti keras (*hardware*). Piranti lunak meliputi sistem, mekanisme, prosedur untuk mengimplementasikan fungsi dan peran, sedangkan piranti keras meliputi sarana, prasarana, dan faktor-faktor pendukungnya seperti dukungan kualitas dan keahlian, serta kapasitas sumber daya manusia, sebagai *supporting system*. Namun semua itu memang belum dapat memuaskan publik. Kami percaya DPR Hasil Pemilu 2009 akan bekerja lebih baik lagi akan melanjutkan tongkat estafet bagi pembentukan demokrasi yang ideal melalui lembaga perwakilan rakyat yang bersendikan pada hakikat kemanusiaan yang berkeadilan sosial.

**Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden,
Sidang Dewan yang terhormat,**

Tiga hari lagi bangsa Indonesia akan memperingati Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-64. Kemerdekaan Republik Indonesia yang telah dicapai dengan penuh pengorbanan, diperjuangkan dengan darah dan nyawa oleh para pejuang bangsa selama tiga setengah abad, akhirnya berhasil diproklamlirkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta. 64 tahun yang

lalu. Kita menundukkan kepala dengan rasa hormat yang tinggi atas perjuangan mereka, para *founding fathers*. Kita tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah SWT, karena hanya dengan ridho-Nya lah, bangsa Indonesia dapat mencapai kemerdekaannya.

Untuk itu, saya selaku Ketua DPR mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali merenungkan dan berintrospeksi tentang apa yang selama ini kita sumbangkan demi tercapainya seluruh cita-cita kemerdekaan RI. Marilah kita sama-sama meninjau kembali, sudahkah perjuangan yang kita lakukan benar-benar sejalan dengan muara pencapaian tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945? Sudahkah kita semua mengarahkan seluruh daya upaya, apakah itu dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan untuk mewujudkan suatu Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum? Apakah implementasi perjuangan kita telah berada dalam koridor yang benar, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan bahkan untuk ikut andil dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial?

Hakikat kemerdekaan Republik Indonesia, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Presiden kita yang pertama, Bung Karno, adalah mencakup tiga aspek yang tidak bisa dipisahkan, yaitu dalam politik kita berkedaulatan, dalam ekonomi kita berdikari dan dalam kebudayaan kita berkepribadian. Jadi, selama dalam politik, kita belum benar-benar memiliki ketegasan terhadap pihak-pihak yang dapat menjadi ancaman bagi keutuhan kedaulatan RI, maka kita belum dapat dikatakan sepenuhnya merdeka. Bila ekonomi kita masih tergantung pada kebijakan yang mengabaikan prinsip-prinsip kemandirian, Republik Indonesia juga belum sepenuhnya merdeka. Demikian pula bila

kita terlalu memuja-muja budaya asing yang kurang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu budaya yang akan berpotensi merusak moral generasi muda kita, itupun dapat menjadi peringatan bahwa sesungguhnya dalam kebudayaan kita belum merdeka.

Demi mewujudkan kemerdekaan yang hakiki di negeri kita ini, seluruh komponen bangsa, pemerintah, anggota-anggota legislatif bersama-sama segenap elemen masyarakat, harus berjuang untuk dapat menghasilkan produk perundang-undangan yang lebih mendukung terhadap pencapaian NKRI yang lebih berdaulat dan disegani oleh seluruh bangsa di dunia. Produk-produk perundang-undangan yang kita hasilkan juga harus mendukung terciptanya perekonomian nasional yang lebih mandiri, dengan mengedepankan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945 dimana intinya adalah mewujudkan suatu perekonomian yang membuat cita-cita ekonomi berdikari dapat kita capai dengan lebih baik dan berada pada koridor dan arah yang benar.

Untuk dapat merdeka dalam berbudaya, Negara RI harus membangun suatu sistem pendidikan nasional yang makin berpihak pada perlindungan terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa kita. Sistem pendidikan di negeri ini harus mampu menanamkan kebanggaan terhadap budaya sendiri sejak sedini mungkin. Hal ini tidak berarti bahwa kita anti budaya barat. Namun hendaknya kita semua, terutama generasi muda memiliki filter yang kuat terhadap apa-apa yang positif dan apa-apa yang negatif yang datang dari luar. Semua ini dilakukan dalam rangka membentuk character building bagi generasi yang akan datang.

Dengan memiliki kemerdekaan politik, kemerdekaan ekonomi dan kemerdekaan budaya itulah kita dengan bangga dapat menyatakan bahwa bangsa Indonesia telah merdeka. Merdeka untuk menentukan dan memperjuangkan cita-cita nasional sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke 64.

Sidang Dewan yang terhormat,

Pada masa sidang ini, melalui Komisi-komisi dan Panitia Anggaran, DPR akan membahas RUU APBN 2010 bersama Pemerintah, yang telah dihantarkan dan dijelaskan oleh Saudara Presiden pada tanggal 3 Agustus 2009 yang baru lalu. Pembahasan RAPBN 2010 perlu dilakukan lebih mantap karena baik DPR maupun Pemerintah akan mengakhiri masa tugasnya pada tanggal 30 September 2009 dan akhir Oktober 2009 yang akan datang. Sedangkan pelaksanaan APBN 2010 itu sendiri yang akan diberlakukan sejak 1 Januari 2010, dilaksanakan oleh Pemerintahan baru. Oleh karena itu, Saudara Presiden mengatakan bahwa RAPBN 2010 adalah RAPBN transisi. DPR dan Pemerintah sepakat bahwa pembahasan RAPBN 2010 harus selesai menjelang akhir bulan september 2009. Untuk itu, DPR dan Pemerintah harus bekerja keras menyelesaikannya.

Sampai dengan triwulan ketiga tahun ini berbagai kalangan baik Pemerintah maupun lembaga moneter/Bank Indonesia memiliki optimisme bahwa situasi perekonomian nasional sudah semakin membaik, sejalan trend perbaikan ekonomi di seluruh dunia, kecuali di beberapa negara yang mengalami pertambahan. Harga komoditas dunia juga telah membaik. Di Indonesia harga minyak mentah, minyak kelapa sawit, batubara, dan hasil pertambangan lainnya, juga berkecendungan semakin baik. Demikian juga permintaan konsumsi rumah tangga dalam negeri. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tidak mengkhawatirkan, kurs rupiah terhadap dollar AS cukup stabil. Secara umum trend inflasi masih menunjukkan penurunan. Dari situasi tersebut, kita sangat mengharapkan bahwa menjelang Ramadhan dan Idul Fitri situasi yang membaik ini dapat memberikan pengaruh positif terhadap

perekonomian nasional utamanya terkait dengan harga-harga kebutuhan pokok.

Namun demikian, ada kekhawatiran berkaitan dengan masalah *Bi rate*. Walaupun berbagai kalangan optimis, ternyata suku bunga acuan (*Bi rate*) yang sekarang ini di posisi 6,5 %, tidak membawa pengaruh terhadap suku bunga pinjaman, kredit bank yang masih bertengger di atas 12%. Masih tingginya suku bunga kredit membawa dampak kurang menguntungkan bagi bergerakinya sektor riil, yaitu kegiatan usaha kecil dan menengah. Oleh karena itu, kalangan Dewan meminta agar *Bi rate* dapat benar-benar dijadikan acuan dan harus memiliki kekuatan di pasar.

Dalam pembahasan RAPBN 2010 yang telah dilakukan melalui Pembicaraan Pendahuluan dalam Masa Persidangan IV Tahun Sidang lalu, DPR menaruh perhatian besar selain masalah pertumbuhan ekonomi dunia, dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi (PDB) Indonesia, juga fokus kepada masalah penyerapan tenaga kerja Indonesia. Banyaknya permasalahan pemutusan hubungan kerja (PHK) termasuk PHK TKI di beberapa negara, harus mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh. Target penyerapan tenaga kerja sebesar 3 juta orang di tahun 2010 dianggap kurang realistis apabila pertumbuhan ekonomi tidak dapat bertahan di atas 5%. Oleh karena itu, kepada Pemerintah diharapkan benar-benar fokus terhadap target penyerapan tenaga kerja ini, lebih-lebih dikaitkan dengan makin menyusutnya lapangan kerja seiring dengan mekanisme pasar bebas di sektor jasa.

Sidang Dewan yang terhormat,

DPR RI 2004-2009 telah menyelesaikan lebih dari 167 RUU dan beberapa hari ke depan masih akan menuntaskan beberapa RUU yang segera memasuki Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan. Pada periode ini, telah dihasilkan

produk perundangan-undangan yang sangat krusial. Dalam bidang politik, telah lahir UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif, dan UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden. UU bidang politik yang dihasilkan adalah merupakan hasil dari suatu niat baik untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan di negara kita yang lebih demokratis. Dalam bidang sosial budaya, kita telah menghasilkan UU yang fenomenal, yaitu UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, dimana UU ini merupakan implementasi visi kita bersama untuk melahirkan suatu UU tentang kewarganegaraan yang memiliki azas universal, dimana pada dasarnya UU tersebut tidak mengenal kewarganegaraan ganda / *bipatride* ataupun tanpa kewarganegaraan / *apatride*. UU lain yang juga telah kita hasilkan di antaranya UU tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, yang merupakan tindak lanjut dari ratifikasi konvensi internasional tentang penghapusan terhadap segala bentuk diskriminasi rasial; UU tentang Pornografi, UU tentang Kementerian Negara, UU tentang Dewan Penasehat Presiden, UU tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU tentang Badan Hukum Pendidikan dan beberapa UU lainnya.

Dalam bidang legislasi, Dewan akan memprioritaskan menyelesaikan RUU-RUU yang menjadi prioritas yang sedang dalam pembahasan tingkat I. RUU-RUU tersebut terutama RUU tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), dan beberapa RUU lainnya yang sedang dibahas secara intens antara Komisi-komisi/Pansus DPR dengan Pemerintah. Akan halnya RUU Pengadilan Tipikor, sesuai komitmen DPR dalam pemberantasan korupsi, maka DPR bertekad untuk dapat menyelesaikannya dalam Masa Sidang I ini, untuk memenuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dewan tidak berkehendak Presiden mengeluarkan Perppu apabila DPR tidak mampu

menyelesaikannya. Untuk itu, kepada Fraksi-fraksi dan khususnya Pansus dimintakan perhatian untuk memprioritaskan penyelesaiannya.

Satu RUU yang baru saja disetujui untuk disahkan menjadi UU yaitu RUU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Semula RUU ini berjudul RUU Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD. RUU ini dibahas cukup lama, efektif kira-kira 1 tahun, merupakan paket terakhir dari 4 RUU bidang politik. Dalam UU ini diatur secara tegas kedudukan, hak dan kewenangan serta fungsi-fungsi lembaga-lembaga negara tersebut termasuk lembaga perwakilan daerah.

Pada saat pembahasannya, terdapat materi-materi yang cukup krusial. Alhamdulillah pada tanggal 3 Agustus yang lalu pada Rapat paripurna luar biasa, RUU ini dapat memasuki Pembicaraan Tingkat II (Pengambilan keputusan). Ke depan kita berharap berbagai UU bidang Politik dapat dibahas dan diputus lebih awal, paling tidak 2 - 3 tahun sebelum Pemilu 2014, agar masalah-masalah yang menimbulkan kekisruhan dalam Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden seperti kondisi sekarang ini, dapat diminimalisir.

Sidang Dewan yang terhormat,

Berkaitan pelaksanaan fungsi pengawasan, Dewan masih terus berusaha untuk menuntaskan beberapa hak DPR yang sedang dalam proses terutama beberapa hak angket yaitu Angket tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1429 H/2008, Angket tentang Pelanggaran Hak Konstitusional Warga Negara untuk Memilih (Angket DPT/Daftar Pemilih Tetap) dan Angket tentang kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM.

Angket penyelenggaraan ibadah haji dimaksudkan agar penanganan haji oleh Pemerintah untuk tahun ini dan tahun-tahun mendatang dapat dilakukan lebih baik lagi. Kuota untuk jemaah

haji Indonesia semakin meningkat, peminatnya semakin banyak tetapi dalam penanganan jemaah tiap tahun masih selalu timbul masalah. Belajar dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, penyelenggara atau penanggungjawab atas pengelolaan perjalanan haji harus lebih memberikan rasa nyaman dan kepuasan kepada para jemaah sehingga mereka benar-benar hanya fokus beribadah.

Sedangkan Angket DPT dimaksudkan untuk menuntaskan masalah-masalah yang sangat mendasar berkaitan dengan hak warga negara untuk memilih, karena banyaknya ketidakberesan/kefidaksempunaan dalam pelaksanaan tugas oleh instansi penyelenggara pemilu.

Sidang Dewan yang terhormat,

Sebagaimana kita ketahui, bahwa kita baru saja usai menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tanggal 8 Juli 2009 lalu dengan situasi secara umum aman, damai, dan tertib KPU juga telah menyampaikan hasil penghitungan perolehan suara dari setiap pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kita menyadari bahwa masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan baik sistem maupun teknis di lapangan yang berakibat banyaknya gugatan ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi (MK) oleh peserta pemilu.

Dua hari yang lalu, MK sebagai lembaga yang berkompeten menangani gugatan hasil pemilu presiden, telah mengeluarkan keputusan. Sebagai negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, semua pihak harus dapat menerima dan mematuhi keputusan tersebut karena putusan MK ini telah memberikan kepastian hukum yang bersifat final atas hasil Pemilu Presiden tanggal 8 Juli 2009 lalu.

**Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden,
Sidang Dewan yang terhormat,**

Dalam forum rapat-paripurna ini Dewan juga meminta perhatian Pemerintah berkaitan dengan masalah kesehatan, salah satu ancaman yang saat ini kita hadapi adalah penyebaran virus H1N1 atau yang biasa disebut Flu Meksiko (Flu Babi). Data terakhir menyebutkan bahwa lebih dari 600 orang yang tersebar di 15 provinsi di Indonesia tertular virus tersebut. Oleh karena itu, Dewan meminta perhatian Pemerintah agar sungguh-sungguh melakukan upaya pengendalian penularan virus tersebut secara cepat, cermat dan berkelanjutan, antara lain dengan menyiapkan rumah sakit rujukan, menyiapkan persediaan obat antivirus, dan melakukan pemantauan penyakit yang berbasis masyarakat.

Permasalahan lain berkaitan dengan pelaksanaan UU Perlindungan Anak, berkaitan dengan adanya kasus penyalahgunaan dan penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi kepada beberapa anak sebagaimana yang baru-baru ini diputuskan oleh Pengadilan Negeri Tangerang. Kenyataannya, amanat UU Perlindungan Anak belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu, Dewan berpendapat bahwa permasalahan anak-anak di Indonesia merupakan prioritas utama pembangunan. Karena mereka ini adalah aset penting bangsa Indonesia di masa depan.

Masalah-masalah lain yaitu masalah program pendidikan gratis dikaitkan dengan pendidikan berkualitas, masalah program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan masih lemahnya komitmen pemerintah daerah untuk menutupi kekurangan biaya yang dibutuhkan sekolah yang dapat berakibat tidak tuntasnya wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah pusat.

**Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden,
Sidang Dewan yang terhormat,**

Tugas dan fungsi Dewan tidak hanya melaksanakan tiga fungsi yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan yang diaplikasikan pada urusan-urusan dalam negeri, tetapi Dewan juga memiliki komitmen dan terpenggil untuk memperkuat diplomasi Indonesia di forum-forum internasional. Dalam tata pergaulan internasional, dalam kurun waktu lima tahun ini DPR aktif melakukan diplomasi dalam memperjuangkan kepentingan Indonesia. Setidak-tidaknya ada beberapa manfaat dari peranan internasional yang diemban DPR RI melalui berbagai forum kerja sama bilateral, regional maupun multilateral yang kami sebut sebagai *second track diplomacy*.

Terdapat cukup banyak Anggota DPR yang terlibat aktif di forum pertemuan Parlemen dunia yang telah ikut memperjuangkan kepentingan Indonesia di tataran percaturan internasional. DPR merupakan anggota aktif dan bahkan duduk di kepengurusan berbagai organisasi dunia, seperti *Inter Parliamentary Union (IPU)*, *Asian Parliamentary Assembly (APA)*, bahkan menduduki jabatan Presiden APA untuk kurun waktu 2 tahun. Indonesia juga sangat berperanan dalam organisasi parlemen regional yaitu *ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA)*, *Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF)*, *Asia Europe Foundation Young Parliamentarian Meeting*; dan bahkan Ketua DPR sekarang masih menjabat sebagai *President Forum of Asia Pacific Parliamentarian for Education (FASSPED)*. Keterlibatan DPR yang demikian aktif dalam organisasi regional/internasional dilaksanakan atas kesadaran pentingnya Indonesia tampil secara intensif, efektif dan kualitatif dalam forum-forum pengambilan keputusan regional dan internasional yang penting dimana Indonesia memiliki kepentingan langsung di dalamnya. Karena itulah, DPR meyakini bahwa keterlibatan penuh di dalam setiap proses dialog di tingkat global sangat penting artinya bagi Indonesia yang merupakan negara besar dengan posisi yang

sangat strategis, potensi kekayaan alam yang besar, jumlah populasi keempat terbesar di dunia dan ekonominya yang terus tumbuh dan berkembang. Inilah manifestasi dari perintah UUD 1945 yang menyatakan *"Indonesia turut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial."*

Sidang Dewan yang terhormat,

Demikianlah pokok-pokok pandangan Dewan terhadap permasalahan aktual dalam forum Rapat Paripurna Dewan hari ini. Sebelum kami mempersilakan Saudara Presiden menyampaikan Pidato Kenegaraan berkaitan dengan Hari Proklamasi Kemerdekaan RI, sebagaimana biasa perlu kami informasikan bahwa di balkon utama telah hadir masyarakat teladan dari seluruh Indonesia atau mereka yang telah berprestasi bagi bangsa dan negara yang dikoordinir oleh instansi-instansi pemerintah, terdiri dari Peraih Medali Olimpiade Internasional, Guru SD Berdedikasi, Kepala Sekolah Berprestasi, dan Pengawas Sekolah Berprestasi; Pemenang Lomba UKS Diknas; Kepala Desa Berprestasi; Lurah Berprestasi, dan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Berprestasi; Ketua LPM Kelurahan, Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan, Ketua Tim Penggerak PKK Desa; Tenaga medis, dokter/dokter gigi, Kearsipan Terbaik, Arsipari, Jambore PTK-PNF, Lomba Lembaga Kursus PNFI, Forum Ilmiah Widyaaiswara, Kepala Sekolah Berwawasan Lingkungan; Pemenang Jurnalis, Tenaga Keperawatan, Tenaga Kesmas, Tenaga Gizi, Finalis Lomba Penelitian Ilmiah Remaja (LPIR) SMA, Finalis Lomba Penelitian Ilmiah Remaja (LPIR) SMP, Ditjen Dikti; Camat Lokasi Desa Juara, Camat Lokasi Kelurahan Juara, Arsiparis Teladan; Peserta KUA Percontohan, Keluarga Sakinah Teladan; Paramedik Veteriner, Pengawas Mutu Pertanian, Pengawas Bibit Temak, Panitia BPS, Koordinator Statistik Kecamatan, Petugas Pembina UPT, Transmigran Teladan; Medik Veteriner, Pengendali

Organisme Pengganggu Tanaman, Peneliti Pertanian; Pendamping Provinsi, Panitia Pusat, Penyuluh Pertanian, Pengawas Mutu Pakan, dan Pengawas Benih Tanam. Sidang paripurna ini juga dimeriahkan oleh Paduan Suara Gita Bahana Nusantara.

Selanjutnya, marilah kita mendengarkan Pidato Kenegaraan yang akan disampaikan oleh Saudara Presiden Republik Indonesia. Kepada Saudara Presiden, kami persilakan.

**PIDATO KENEGARAAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Demikian telah kita ikuti bersama Pidato Kenegaraan yang disampaikan oleh Saudara Presiden. Atas nama Dewan Perwakilan Rakyat, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Saudara Presiden yang telah menyampaikan Pidato Kenegaraannya.

Selanjutnya kami minta kesediaan Saudara Menteri Agama untuk membacakan doa. Kepada Saudara Menteri Agama, kami persilakan.

PEMBACAAN DOA OLEH MENTERI AGAMA

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Menteri Agama.

Dengan telah selesainya penyampaian Pidato Kenegaraan oleh Saudara Presiden, maka kita telah melaksanakan agenda Sidang Paripurna Dewan pagi ini.

Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak atas segala perhatian yang telah diberikan, sehingga memungkinkan Sidang Paripurna Dewan hari ini berjalan dengan tertib dan lancar.

Selanjutnya kami beritahukan bahwa untuk acara kedua, Pemandangan Umum Fraksi-fraksi atas RUU RAPBN 2010, akan kita laksanakan pada siang hari nanti dan dimulai pukul 14.00 WIB, bertempat di Gedung Nusantara II Paripurna Lantai 3.

Dengan seizin sidang, maka perkenankanlah saya menskors Rapat Paripurna pada siang hari ini dan kemudian akan dilanjutkan pada pukul 14.00 WIB.

DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

**RAPAT DISKORS
KETOK PALU 1 KALI**

Jakarta, 14 Agustus 2009

**KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**


H.R. AGUNG LAKSONO